

Kebijakan Menkeu Purbaya Terkait Dana Mengendap

Ramadhan

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Give Your Opinion (November)</p>	<p>Kebijakan Kementerian Keuangan pada tahun 2025 terkait penempatan dana negara sebesar Rp 200 triliun pada lima bank milik negara (Himbara) yang bertujuan mendorong likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil. Penulis mengkritisi efektivitas kebijakan tersebut, mengingat hingga akhir September 2025 baru tercatat penyaluran dana sebesar Rp 112,4 triliun, yang memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Menggunakan perspektif ekonomi syariah, tulisan ini menekankan pentingnya prinsip amanah dan keadilan distribusi, serta menyoroti kesenjangan akses modal yang masih dialami oleh pelaku UMKM dibandingkan korporasi besar. Sebagai rekomendasi, penulis mengusulkan peningkatan akuntabilitas publik, pelibatan lembaga keuangan syariah dengan skema bagi hasil, serta pengawasan independen untuk memastikan dana publik dikelola secara produktif demi kemaslahatan bersama.</p>
<p>Keywords: <i>Kebijakan Penempatan Dana Negara, Ekonomi Syariah, UMKM, Transparansi Anggaran, Likuiditas Perbankan</i></p>	
<p>Editor: Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business</p>	

PENDAHULUAN

Merasa cukup tergugah ketika membaca kabar bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan dana negara senilai Rp 200 triliun ke lima bank milik negara (Himbara) pada awal September 2025 yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Ketika direnungkan, angkanya sangat besar untuk ukuran penempatan dana pemerintah ke bank dan tujuan utamanya itu disebut untuk mendorong likuiditas perbankan dan memacu penyaluran kredit ke sektor riil. Namun, di sisi lain, hingga 30 September 2025 baru sekitar Rp 112,4 triliun dari dana tersebut yang tercatat telah disalurkan oleh bank-bank mitra ke kredit produktif. Pentingnya menganalisa kasus ini adalah munculnya keraguan dan pertanyaan bahwa: apakah kebijakan ini benar-benar dirancang dan dijalankan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan amanah yang semuanya adalah nilai fundamental dalam ekonomi syariah atau justru berpotensi menjadi bentuk *short-term stimulus* yang meninggalkan masalah tata kelola dan keadilan di belakangnya.

Sebagai contoh konkret dalam pengalaman sehari-hari, melihat banyak UMKM kecil di sekitar lingkungan yang masih kesulitan mendapatkan kredit atau modal dengan bunga rendah, sementara bank-bank besar mendapat suntikan dana dari pemerintah dengan persyaratan yang relatif ringan. Jika mekanisme penempatan Rp 200 triliun ini tidak dilengkapi dengan kebijakan yang memprioritaskan sektor usaha kecil dan menengah, maka secara sosial ekonomi kita bisa saja menciptakan “jalur cepat” untuk pemain besar dan “jalur tertunda” untuk pelaku kecil yang tentu saja bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menempatkan kesejahteraan bersama dan pemerataan sebagai bagian penting dari kemaslahatan.

Kalau berpikir lebih jauh lagi, penempatan dana publik sebesar ini harus disertai dengan akuntabilitas publik dan *monitoring yang terbuka*. Prinsip amanah dalam Islam mensyaratkan bahwa harta publik yang diberikan kepada lembaga atau bank harus dikelola dengan penuh kepercayaan dan tidak disalahgunakan.

Tanpa adanya transparansi, kita mungkin hanya akan melihat angka besar seperti Rp 200 triliun, tetapi tidak tahu efek nyata di lapangan: seberapa banyak kredit yang benar-benar mengalir ke sektor yang membutuhkan kah? Seberapa banyak berdampak pada pertumbuhan inklusif dan lain-lain.

Dengan melihat semua fakta di atas, studi kasus ini sangat penting untuk dibahas karena menyentuh kerangka ekonomi syariah yang sering kurang mendapat sorotan tidak hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi soal bagaimana angka tersebut tercapai, *siapa* yang menikmati manfaatnya, dan *apakah* mekanisme yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama.

PEMBAHASAN

Waktu pertama kali mendengar soal kebijakan pemerintah yang menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di lima bank BUMN (Himbara), sempat berpikir ternyata sangat besar. Dikatakan bahwa tujuannya untuk membantu likuiditas bank dan agar penyaluran kredit ke masyarakat bisa lebih lancar. Kalau memang begitu, tentu ini hal yang bagus, apalagi di saat ekonomi lagi butuh dorongan setelah beberapa tahun terakhir masih belum stabil sepenuhnya. Tapi setelah ditelaah lagi, ternyata sampai akhir September 2025, baru sekitar Rp 112 triliun yang benar-benar disalurkan ke sektor produktif. Dari situ mulai berpikir kalau dananya sebesar itu, kenapa baru separuhnya yang benar-benar jalan? Apakah program ini beneran membantu masyarakat kecil atau justru cuma menguntungkan pihak tertentu aja?

Masalahnya bukan cuma di angka atau laporan-laporan resmi saja, tetapi lebih ke pertanyaan dasar: apakah uang sebesar itu benar-benar digunakan dengan adil dan juga transparan? Karna jika uang negara (yang notabene uang rakyat juga) cuma berputar di lingkaran bank besar tanpa efek nyata ke masyarakat kecil, menurut saya itu udah keluar dari semangat keadilan yang jadi nilai utama dalam ekonomi Islam. Terlihat di lingkungan sekitar terdapat banyak pelaku UMKM yang masih susah mendapat modal, mereka harus mengajukan pinjaman dengan proses panjang dan bunga yang tidak ringan, padahal pemerintah menyampaikan bahwa likuiditas perbankan lagi “longgar”. Tetapi ternyata kebijakan ini belum sepenuhnya menyentuh lapisan bawah, yang justru paling membutuhkan bantuan. Dikhawatirkan juga soal transparansi, seperti rakyat yang tidak tahu secara jelas uang itu disalurkan ke mana saja, sektor mana yang mendapatkan paling banyak, dan seberapa besar dampaknya buat masyarakat. Padahal, jika menjalankan amanah dengan baik, hal-hal seperti ini harusnya dibuka secara transparan agar publik bisa melihat dan ikut mengawasi. Apabila tidak dilaksanakan seperti itu, justru akan menjadi program besar yang hanya baik di laporan tapi tidak terasa di lapangan.

Dan yang terakhir, inti dari ekonomi yang baik itu bukan cuma seberapa besar pertumbuhan atau berapa banyak uang yang beredar, tapi siapa yang merasakan hasilnya. Jika hanya segelintir orang atau kelompok tertentu, berarti ada yang salah dalam cara kita mengelola ekonomi. Islam sendiri mengajarkan soal keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam mengelola harta. Jadi, kebijakan yang benar itu bukan cuma sukses di angka, tapi juga harus terasa manfaatnya buat masyarakat luas.

Yakin jika kebijakan seperti ini bisa jadi langkah awal yang apabila dijalankan dengan benar dan pemerintah memastikan bahwa uang itu disalurkan ke sektor yang tepat, terutama ke UMKM dan masyarakat kecil. Tapi tanpa adanya pengawasan dan keterbukaan, akhirnya hanya jadi angka besar di berita tanpa makna nyata di kehidupan rakyat. Mungkin harapan kedepannya, pemerintah bisa lebih terbuka soal pengelolaan dana publik seperti ini. Libatkan masyarakat, lembaga independen, atau bahkan kampus buat bantu ngawasin. Karena jika kita sama-sama menjaga kejujuran dan amanah dalam urusan ekonomi, maka pertumbuhan yang dihasilkan tidak hanya terlihat di laporan keuangan, tapi juga dirasakan oleh semua kalangan dari kota sampai desa.

Solusi dan Rekomendasi

Kebijakan penempatan dana sebesar Rp 200 triliun di lima bank BUMN itu sebenarnya bisa jadi langkah yang baik jika memang dijalankan dengan benar dan tepat sasaran. Tapi kalau pengawasannya lemah dan penyalurannya cuma berputar di kalangan atas, kebijakan ini malah bisa jadi bumerang bikin kesenjangan makin lebar dan manfaatnya tidak sampai ke masyarakat kecil. Karena itu, ada beberapa hal penting yang bisa dilakukan supaya dana sebesar ini benar-benar memberi dampak positif dan sesuai dengan nilai keadilan dalam ekonomi Islam.

1. Dana Harus Benar-Benar Mengalir ke Sektor” UMKM

UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 mencatat bahwa ada lebih dari 65,5 juta pelaku UMKM yang berkontribusi sekitar 60,5% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. artinya, kalau dana Rp200 triliun itu bisa diarahkan ke sektor ini, dampaknya pasti terasa besar bagi rakyat kecil. Pemerintah harus membuat sistem agar bank penerima dana wajib menyalurkan sebagian besar pembiayaan ke UMKM, bukan cuma ke perusahaan besar.

2. Transparansi Harus Ditingkatkan

Jika bicara soal uang publik, hal yang paling penting adalah keterbukaan. Masyarakat berhak tahu uang negara sebesar itu digunakan untuk apa aja dan siapa yang mendapatkan manfaatnya. Situs-situs resmi seperti Kemenkeu dan OJK harusnya bisa menyediakan laporan berkala yang mudah diakses publik. Jangan cuma menyebut “penyerapan sudah 80%”, tapi juga tunjukkan rincian: sektor mana yang menerima, berapa jumlah kredit UMKM yang disalurkan, dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat kecil.

3. Melibatkan Lembaga Keuangan Syariah

Sistem keuangan Islam bisa membantu memastikan keadilan distribusi. Bank Syariah Indonesia (BSI) misalnya, seharusnya diberi peran lebih besar dalam mengelola dana ini dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), bukan pinjaman berbunga.

4. Perlu adanya Pengawasan yang Independen dan Terbuka

Perlu adanya lembaga atau tim pengawas independen yang memastikan bahwa dana ini tidak disalahgunakan. Bisa melibatkan lembaga audit, akademisi, atau bahkan mahasiswa melalui riset” kampus. Konsep hisbah dalam Islam yaitu pengawasan sosial dan ekonomi bisa diterapkan dalam bentuk modern. Jadi, masyarakat juga bisa ikut memantau, bukan hanya pemerintah atau bank.

5. Menanamkan Nilai Amanah dan juga Keadilan

Pada akhirnya, sebesar apa pun kebijakan ekonomi, semua kembali ke niat dan moral pelaksananya. Dalam Islam, uang publik bukan sekadar angka di laporan, tapi amanah yang harus dijaga. Kalau setiap pihak baik pemerintah, bank, maupun pelaku usaha menjalankan perannya dengan jujur dan bertanggung jawab, insyaAllah dana sebesar apa pun bisa membawa keberkahan, bukan hanya pertumbuhan semu.

PENUTUP

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah menempatkan Rp 200 triliun di lima bank BUMN bisa menjadi langkah baik kalau dijalankan dengan adil dan transparan. Tujuannya untuk menjaga likuiditas memang positif, tetapi jika pelaksanaannya tidak diawasi dengan baik, dana sebesar itu bisa saja tidak tepat sasaran dan justru memperlebar kesenjangan ekonomi.

Uang publik yang sebesar ini adalah amanah yang besar. Dalam ekonomi Islam, pengelolaan harta harus jujur, adil, dan memberi manfaat untuk semua, bukan hanya kelompok tertentu. Karena itu, hapan besar kepada pemerintah agar bisa lebih terbuka, serta memperkuat pengawasan, dan juga memastikan bahwa dana tersebut benar-benar membantu sektor kecil seperti UMKM. Jika kebijakan dijalankan dengan niat baik dan penuh tanggung jawab, insya allah pertumbuhan ekonomi bukan cuma terlihat di angka, tapi juga terasa oleh masyarakat luas. Itulah esensi ekonomi Islam yang sebenarnya adil, berkeadilan sosial, dan membawa keberkahan bagi semua aamiin yaa robbal alamin.

“Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, saya belajar bahwa keadilan ekonomi tidak cukup diukur dari angka, tapi dari rasa cukup dan kesejahteraan yang dirasakan rakyat kecil.”

REFERENSI

- CNN Indonesia. (2025, 13 Oktober). Purbaya Ungkap Rapor 5 Bank dalam Salurkan Rp200 T, Mana Paling Bagus? <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251013102857-532-1283869/purbaya-ungkap-rapor-5-bank-dalam-salurkan-rp200-t-mana-paling-bagus>
- Kementerian PANRB. (2025, 28 September). Menkeu Terbitkan Aturan Penempatan Rp200 Triliun Uang Negara di Bank Umum Mitra. <https://djpbc.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/4543-menkeu-terbitkan-aturan-penempatan-rp200-triliun-uang-negara-di-bank-umum-mitra.html>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). Data Statistik UMKM Nasional Tahun 2024. <https://kemenkopukm.go.id>